

**GERAKAN SOSIAL UMAT ISLAM DI DONGGO, BIMA,
NUSA TENGGARA BARAT PADA MASA PEMERINTAHAN
LETKOL SOEHARMADJI, 1969-1973 M.**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora
(S.Hum)

Oleh:

Ang Rijal Anas

NIM: 18101020007

**PROGRAM STUDI SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ang Rijal Anas
NIM : 18101020007
Program Studi : Sejarah dan Kebudayaan Islam
Fakultas : Adan dan Ilmu Budaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 15 Mei 2023

Saya yang menyatakan



Ang Rijal Anas
18101020007

NOTA DINAS

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum warahmatullahi wabaraakatuh

Setelah memberikan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul “Gerakan Sosial Umat Islam di Donggo, Bima, Nusa Tenggara Barat Pada Masa Pemerintahan Letkol Soeharmadji, 1969-1973 M.” yang ditulis oleh:

Nama : Ang Rijal Anas
NIM : 18101020007
Program Studi : Sejarah dan Kebudayaan Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk menempuh sidang munaqosyah.

Demikian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabaraakatuh

Yogyakarta, 15 Mei 2023
Dosen Pembimbing



Herawati, S.Ag., M.Pd.
NIP. 19720424199903 2003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 513949 Fax. (0274) 552883 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1433/Un.02/DA/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : Gerakan Sosial Umat Islam Di Donggo, Bima, Nusa Tenggara Barat Pada Masa Pemerintahan Letkol Soehardjati, 1969-1973 M.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANGRJAL ANAS
Nomor Induk Mahasiswa : 18101020007
Telah diujikan pada : Rabu, 31 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Herawati, S.Ag., M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 64643ee7283e9



Penguji I
Prof. Dr. H Duding Abdurrahman, M.Hum
SIGNED

Valid ID: 646e63729abdc



Penguji II
Prof. Dr. Muhammad Wildan, M.A.
SIGNED

Valid ID: 646ee01706ab3



Yogyakarta, 31 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
Prof. Dr. Muhammad Wildan, M.A.
SIGNED

Valid ID: 646dc917045ec

MOTTO

“Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan”

“Demi pena, dan apa yang mereka tuliskan”

“Wahai orang-orang yang berselimut. Bangunlah, lalu berilah peringatan!”

(Gusti Allah)

“Engkau memang harus bersusah payah mencari ilmu, namun suatu saat engkau akan mulia dan dicari orang karena peroleh ilmu”

(Ibnu Abbas)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku,

Bapak dan mama yang telah ikhlas melepasku pergi dan yang tak bosan bertanya:

“Bagaimana kabarmu?”.

ABSTRAK

Donggo merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Dou* Donggo atau masyarakat Donggo merupakan masyarakat plural dengan penduduk mayoritas beragama Islam yang hidup dalam wilayah geografis dataran tinggi dan pegunungan, sehingga membentuk kultur masyarakat agraris dengan bahasa, adat istiadat, dan cara produksi kebudayaan yang berbeda dengan wilayah Bima pada umumnya. Pemerintahan Orde Baru melalui Bupati DATI II Bima, Letkol Soeharmadji dinilai telah melakukan diskriminasi pembangunan dengan arus utama pembangunan daerah ibu kota Kabupaten di wilayah dataran rendah, terutama Kecamatan Rasana'E. Pembangunan sentralistik tersebut mengakibatkan segregasi dan sentimen antara wilayah tinggi dan wilayah rendah, wilayah tertinggal dan wilayah maju. Klaim diskriminasi pembangunan ini menimbulkan berbagai reaksi dan respons dari masyarakat, terutama umat Islam di Donggo. Adapun bentuk respons umat Islam ialah melakukan gerakan protes terhadap kebijakan pembangunan Letkol Soeharmadji dalam bentuk aksi demonstrasi pada tahun 1972. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji latar sosial dan keadaan umat Islam di Kecamatan Donggo, perkembangan pembangunan masyarakat Donggo pada masa pemerintahan Letkol Soeharmadji, dan gerakan protes umat Islam serta implikasi gerakan tersebut pada perkembangan kehidupan sosial di Kecamatan Donggo.

Penelitian ini merupakan kajian sejarah sosial. Oleh karena itu peneliti menggunakan pendekatan sosial-politik. Adapun, teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori mobilisasi sumber daya dari Mancur Olson yang menjelaskan bahwa gerakan kolektif sebagai aksi-aksi rasional, memiliki tujuan, dan terorganisasi. Beragam aksi protes tersebut, bersumber dari bagaimana gerakan sosial mengorganisasi ketidakpuasan, mengurangi biaya aksi, menggunakan dan menciptakan jaringan solidaritas untuk mencapai kesepakatan internal. Adapun metode penelitian yang digunakan yakni metode sejarah melalui tahapan heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi.

Adapun hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, situasi sosial-keagamaan umat Islam di Kecamatan Donggo banyak dipengaruhi oleh proses dakwah dari para mubalig yang dikirim ke Kecamatan Donggo. Selain itu, kondisi politik-ekonomi nasional pasca 1965 juga memengaruhi dinamika politik di Kecamatan Donggo serta pluralitas budaya dan nilai adat juga memengaruhi pandangan hidup masyarakat Donggo. *Kedua*, munculnya Letkol Soeharmadji menggantikan Putra Kahir sebagai Bupati DATI II dengan kebijakan pembangunan yang dinilai kurang memperhatikan wilayah Kecamatan Donggo memunculkan reaksi dan respons dari masyarakat Donggo terutama umat Islam. Hal inilah menjadi sebab munculnya gerakan protes umat Islam. *Ketiga*, gerakan protes, hubungan, dan jaringan organisasi IPMDB berhasil memobilisasi umat Islam. Dengan menggunakan *framing* agama dan rasa solidaritas umat, gerakan tersebut berhasil dilakukan dalam aksi demonstrasi 1972 dan aksi tersebut berimplikasi terhadap perkembangan sosial masyarakat di Kecamatan Donggo.

Keyword: *Gerakan Sosial, Umat Islam, Pembangunan, Pemerintah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semua kesehatan dan kesempatan hingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Selawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, manusia revolusioner dan manusia yang mengajarkan kepada kita, apa artinya “pemberontakan” pada tatanan lama yang tidak adil.

Proses panjang yang mengajarkan pentingnya kesabaran, doa, disiplin, bacaan, *ngopi*, silaturahmi, perhatian, dan *mood* yang baik telah peneliti jalani hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Gerakan Sosial Umat Islam di Donggo, Bima, Nusa Tenggara Barat Pada Masa Letkol Soeharmadji, 1969-1973 M”. Skripsi ini disusun dan diselesaikan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum) pada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Peneliti menyadari bahwa tugas ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung. Untuk itu, melalui kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Al Makin, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Muhammad Wildan, M.A., selaku Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

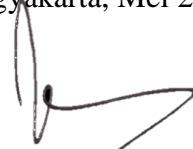
3. Riswinarno, SS., MM., selaku Ketua Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam.
4. Fatiyah, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada peneliti.
5. Herawati, S.Ag., M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, mengkritik, memberikan saran, dan banyak memaklumi peneliti bagi perbaikan skripsi ini dan melatih peneliti untuk menulis karya ilmiah yang serius, bukan asal jadi. Sekali lagi, terima kasih.
6. Kepada kedua orang tua: M. Hatta dan Siti Muslimah, juga kepada kedua kakak peneliti: Than Tie Amirah dan Ang Rijal Amin. Berkat doa, dukungan, kekuatan, motivasi, dan keikhlasan dari kalian semua, peneliti bisa sampai pada titik ini. Terima kasih juga telah menjadikan rumah sebagai sekolah, tempat belajar banyak hal sampai kapan pun dan dalam kondisi apa pun, kita akan berkumpul kembali.
7. Keluarga yang tidak bosan mendukung dengan uangnya: Nenek, kakek, Om Nadin, Om Tahib, Ua Hima, Ibu Dau, dan keluarga lainnya. Al Fatihah untuk yang telah mendahului kita semua.
8. Prof. Dr. Abdul Wahid dan Prof. Dr. Atun Wardatun yang telah memberikan banyak kesempatan pada peneliti untuk mengembangkan diri, ruang-ruang belajar itu sungguh mengasyikkan: Kalikuma Library, Alamtara Institute, La Rimpu, dan belakangan di portal Alamtara.co. Untuk Aba Du Wahid, terima kasih untuk diskusi, koreksi, dan revisinya untuk ide awal skripsi ini.

9. Teman-teman Komunitas Mbojo Itoe Boekoe: Putri, Hera Imals, Alva, Almum, Ifa, Rifda, Mubin, Musab. Generasi kedua: Devi, Hani, Habibah, dan Jaini. Generasi ketiga: Saldin, Andi, Mita, Yana, dan kawan-kawan lainnya.
10. Teman-teman Komunitas Indonesia Itoe Boekoe: Yumna, yang ceritanya terus mengalir sampai jauh. Ozan, pemegang kunci gerakan yang selalu tampil *cool*. Dina, manusia yang prinsipnya *slow but sure*. Ria, yang selalu bisa diajak ngopi. Syauqi, “guru spiritual” peneliti merangkap *sando* dalam sirkel mafioso ini. Terakhir, Iril, calon anggota DPRD Kota Bima.
11. Teman-teman SKI A 2018: Dimas, Ramdan, Nia, Arinda, Putri, Rahmi, Anggit, Artika, Zul, Yasmin, Putri, Rizka, Fadhilah, Ibnu, Ronal, Tedi, dan kawan-kawan lainnya. Senang berada di tengah-tengah kalian.
12. Teman-teman KKN 105, Posko Bonto: Lisa, Raodah, Dini, Annisa, Qiqi, dan Fitri. Terkenang, angin malam yang selalu berhembus dari pesisir pantai itu.
13. Teman-teman HMI Komisariat Adab.
14. Senior-senior dan teman-teman di Jogja: Kak Ruwaidah, Kak Hida, Kak Raodah, Kak Duli, Ardian, Aba Sulbi, dan segerombolan pasukan *Suba* dari Bima.
15. Teruntuk seluruh rakyat Indonesia, berkat pajak yang kalian bayarkan, akhirnya saya bisa kuliah lewat Bidikmisi.

Atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak di atas, maka penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Besar harapan peneliti, skripsi ini dapat

dipertanggungjawabkan dengan baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan kajian sejarah lokal dan studi keislaman di Indonesia. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik, saran, masukan, perbaikan sangat peneliti harapkan.

Yogyakarta, Mei 2023



Ang Rijal Anas
NIM: 18101020007

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Landasan Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II: MASYARAKAT MUSLIM DAN KONDISI SOSIAL-POLITIK DI KECAMATAN DONGGO.....	25
A. Situasi Sosial-Budaya Masyarakat Kecamatan Donggo	25
1. Letak Geografis dan Penduduk Wilayah Kecamatan Donggo	25
2. Agama Masyarakat Donggo	27
3. Adat Istiadat dan Budaya Masyarakat Donggo	30

B.	Situasi Umat Islam di Kecamatan Donggo	33
C.	Situasi Sosial-Politik dan Ekonomi di Kecamatan Donggo	36
BAB III:	PEMBANGUNAN MASYARAKAT DONGGO PADA MASA BUPATI LETKOL SOEHARMADJI	39
A.	Kepemimpinan Letkol Soeharmadji	39
B.	Kebijakan-Kebijakan Bupati Letkol Soeharmadji dalam Pembangunan Masyarakat Donggo	42
C.	Respons Masyarakat Terhadap Kebijakan-Kebijakan Pemerintahan Letkol Soeharmadji	46
BAB IV:	GERAKAN PROTES UMAT ISLAM TERHADAP PEMERINTAHAN BUPATI LETKOL SOEHARMADJI	49
A.	Kelompok Gerakan dan Mobilisasi Umat Islam.....	49
B.	Protes Umat Islam Terhadap Pemerintahan Letkol Soeharmadji	56
C.	Implikasi Protes Umat Islam Terhadap Perkembangan Sosial di Kecamatan Donggo.....	82
BAB V	PENUTUP	101
A.	Kesimpulan	101
B.	Saran-Saran	104
DAFTAR PUSTAKA		106
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		110
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		124

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I: Harian Kami, edisi 30 Juni 1972, hlm. 1, kol. 3-4.....	110
Lampiran II: Harian Kami, edisi 30 Juni 1972, hlm. 1, kol. 3-4. (Lanjutan).....	111
Lampiran III: Harian Abadi, edisi 11 Juli 1972, hlm. 2, kol. 7-8.....	112
Lampiran IV: Harian Abadi, edisi 14 Juli 1972, hlm. 2, kol. 3-7.....	113
Lampiran V: Harian Abadi, edisi 17 Juli 1972, hlm. 2, kol. 1-2.	114
Lampiran VI: Harian Abadi, edisi 18 Juli 1972, hlm. 2, kol. 4-5.....	115
Lampiran VII: Persidangan di Pengadilan Negeri Raba-Bima	116
Lampiran VIII: Persidangan di Pengadilan Negeri Raba Bima	117
Lampiran IX: Masyarakat Mengikuti Proses Persidangan	118
Lampiran X: Dokumentasi dalam Rumah Tahanan di Mataram	119
Lampiran XI: Dokumentasi Masyarakat Donggo	120
Lampiran: XII: Foto Letkol Soeharmadji	121
Lampiran XIII: Logo IPMDB.....	122
Lampiran XIV: Daftar Informan	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Donggo merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Secara geografis, wilayah Kecamatan Donggo berada di wilayah dataran tinggi pegunungan. Kata Donggo berasal dari bahasa Bima kuno yang berarti gunung yang tinggi (*Doro Salunga*).¹ Wilayah Donggo dihuni oleh masyarakat Donggo (*Dou Donggo*) yang merupakan salah satu sub-etnis yang mendiami Pulau Sumbawa, selain etnis mayoritas seperti Mbojo, Dompu, Sumba, dan Jawa. Mata pencaharian utama masyarakat Donggo yakni bertani. Mereka bertani dari gunung ke gunung secara berpindah-pindah dengan mengandalkan air hujan.² Salah satu bukti sah masyarakat Donggo sebagai masyarakat agraris tercermin dari adanya ritual adat: *raju* dan *doa kasaro*.³ Ritual ini berfungsi meminta hujan serta menjadi wadah silaturahmi antar masyarakat Donggo.

¹ M. Hilir Ismail, *Sejarah Mbojo Bima dari Zaman Naka ke Zaman Kesultanan*, (Bogor: Rizald, 2007), hlm. 170.

² Nurul Inayati, "Islamisasi di Donggo (Suatu Tinjauan Historis)", Skripsi UIN Alaudin Makassar (2016), hlm. 27.

³ *Raju* adalah acara adat masyarakat Mbawa dalam menyambut musim tanam dan musim panen. Upacara adat ini melibatkan semua masyarakat tanpa adanya sekat-sekat agama. Sedangkan *doa kasaro* adalah doa yang dilantunkan dalam bahasa Donggo berisi harapan agar diberi kehidupan dan hasil pertanian yang melimpah. Selengkapnya lihat Abdul Wahid, "Praktik Budaya Raju dalam Pluralitas Dou Mbawa di Bima Nusa Tenggara Barat" Disertasi Universitas Udayana Bali (2016).

Bupati Pemerintah Daerah Tingkat II (DATI II) Bima, Letkol Soeharmadji tahun menjabat tahun 1967-1974.⁴ Agenda politik yang dijanjikan Letkol Soeharmadji kepada masyarakat Kecamatan Donggo dalam implementasinya tidak sesuai dengan kenyataan. Ketimpangan pembangunan daerah, masalah agraria, dan sikap militeristik yang ditunjukkan Letkol Soeharmadji membuat masyarakat muslim Donggo melakukan gerakan protes dalam bentuk demonstrasi. Tujuan dari demonstrasi ini mendesak mundur Bupati Letkol Soeharmadji. Selain itu, aksi demonstrasi ini menuntut pemerataan pembangunan daerah, khususnya wilayah Kecamatan Donggo agar wilayah tersebut sama seperti wilayah lain di Kabupaten Bima.⁵ Adapun pusat pemerintahan dan pendidikan berada di wilayah Rasana'E (Kota Bima sekarang).

Ketimpangan pembangunan di Kecamatan Donggo di bawah kepemimpinan Bupati Letkol Soeharmadji terlihat dari minimnya pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan perkantoran. Selain itu, wacana untuk mengubah nama Kecamatan Donggo menjadi Kecamatan Bolo Baru menimbulkan kesan dari masyarakat muslim Donggo bahwa Bupati Letkol Soeharmadji tidak peduli pada nilai historis di Kecamatan Donggo.

⁴ Ada perbedaan versi yang menyatakan periode kepemimpinan Bupati Soeharmadji. Misalnya menurut Ompu Ndaru dalam tulisannya *Bima sebagai Identitas* bahwa kepemimpinan Letkol Soeharmadji tahun 1968-1974 dan menurut data Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Bima menyatakan bahwa periode jabatan Letkol Soeharmadji dari tahun 1970-1975. Peneliti menggunakan tahun 1967-1974 karena banyak dikutip dan digunakan peneliti sebelumnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

⁵ Mustahid dan Ghazaly Ama La Nora, *Peristiwa Donggo 1972 Sketsa Pergolakan Politik Bima Era Orde Baru*, (Mataram: PT. Suaranusa Niaga Nusantara, 2017), hlm. 60-61.

Adapun kondisi keagamaan masyarakat wilayah Kecamatan Donggo dihuni oleh masyarakat yang mayoritas beragama Islam, beberapa warga Katolik, dan Protestan. Sebelum tahun 1969, kehidupan sosial-keagamaan masyarakat Donggo relatif damai dan aman. Pada tahun 1969, terjadi konflik antar umat beragama di Desa Mbawa, Kecamatan Donggo. Terjadinya konflik antar umat Islam dan Katolik tersebut bermula dari kasus pencurian sandal milik umat Islam yang dilakukan oleh salah seorang warga beragama Katolik. Dengan sentimen agama yang kuat, kasus pencurian sandal tersebut akhirnya berujung pada pembakaran rumah warga Katolik dan penghancuran Gereja Katolik oleh umat Islam serta pengusiran seorang pastor dari Desa Mbawa.⁶

Selain kasus tersebut, isu kristenisasi yang dilakukan oleh misionaris di Desa Mbawa semakin memperkeruh hubungan umat Islam dan Katolik. Dengan penyebaran yang begitu masif dan sokongan sumber daya manusia dan dana yang kuat, agama Katolik menjadi agama mayoritas masyarakat Desa Mbawa. Dengan situasi ini, umat Islam merasa “terkalahkan” dari umat Katolik.⁷ Situasi pertentangan antara Islam dan Katolik menciptakan instabilitas daerah di Kecamatan Donggo. Terjadinya konflik keagamaan di Kecamatan Donggo, secara politis, bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Orde Baru di bawah Menteri Agama, Prof. Mukti Ali yang sedang mempromosikan kebijakan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

⁶ I Made Purna, “Kearifan Lokal Masyarakat Desa Mbawa Dalam Mewujudkan Toleransi Beragama”, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Volume 1, No. 2, Agustus 2016, hlm. 262.

⁷ Abdul Wahid, *Dua Suara Tuhan Pergumulan Etos Agama dan Budaya di Ruang Publik*, (Mataram: Alamtara Institute bekerjasama dengan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram, 2020), hlm. 175.

Menghadapi Pemilu tahun 1971, terjadi upaya ‘Golkarisasi’, pemerintah mewajibkan semua orang untuk memilih Golkar. Bupati Bima Letkol Soeharmadji dan anggota tentara yang merupakan kaki tangan Golkar di Bima melakukan intimidasi kepada masyarakat yang tidak memilih Golkar. Hasil Pemilu tahun 1971 secara nasional dimenangkan Golkar. Namun, suara Golkar pada Pemilu tersebut di Kecamatan Donggo dinyatakan kalah. Suara Golkar tidak lebih banyak dari suara partai Islam. Di antaranya Parmusi, yang dipimpin oleh KH. Abdul Madjid Bakry, disusul oleh PSII yang diketuai oleh Abdullah, dan Nahdlatul Ulama yang diketuai oleh H. Rasyid.⁸ Kekalahan yang dialami Golkar di Kecamatan Donggo membuat Bupati Letkol Soeharmadji geram. Secara politis, kekalahan Golkar inilah yang membuat Letkol Soeharmadji antipati pada pembangunan wilayah Kecamatan Donggo.

Situasi di atas membuat beberapa tokoh masyarakat muslim Donggo yang diwakili kalangan ulama, tokoh masyarakat, dan mahasiswa mencoba menggabungkan diri dengan menginisiasi gerakan demonstrasi pada tahun 1972. Kesamaan nasib dan rasa penderitaan yang sama atas tindakan represif pemerintahan Letkol Soeharmadji kepada masyarakat muslim Donggo karena ketimpangan pembangunan di wilayah Kecamatan Donggo membuat elite-elite masyarakat muslim Donggo melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk protes masyarakat muslim Donggo kepada Letkol Soeharmadji.

Demonstrasi masyarakat muslim ini ialah upaya menegakkan amar makruf nahi mungkar dan membela agama Islam dalam bentuk jihad melawan

⁸ Aksa, “Peristiwa Donggo 1972 di Bima dalam Melawan Rezim Orde Baru”, *Jurnal Al Qalam*, Volume 25, No. 3, November 2019, hlm. 504.

kemungkaran dan kerusakan. Selain itu, aksi demonstrasi masyarakat muslim tersebut sebagai bentuk protes terhadap kepemimpinan Letkol Soeharmadji yang dinilai telah banyak menyimpang. Dengan memanfaatkan, karisma dan ketokohan beberapa elite masyarakat muslim Donggo yang berlatar belakang ulama, birokrat desa, dan mahasiswa di atas, membuat upaya mobilisasi massa semakin mudah.⁹ Selain itu, masyarakat muslim Donggo yang kecewa atas dilengserkannya Putra Kahir (Sultan Bima ke-XV) sebagai Bupati DATI II Bima dianggap oleh masyarakat muslim Donggo telah berhasil membawa kemakmuran dinilai sebagai usaha mengurangi eksistensi kesultanan sebagai representasi Islam di Bima. Oleh sebab itu, menurut peneliti, resistensi masyarakat muslim Donggo terhadap kepemimpinan Letkol Soeharmadji sebagai Bupati DATI II Bima bisa kita lihat sebagai resistensi masyarakat muslim disebabkan ingin mengembalikan eksistensi kesultanan dan Islam pada umumnya.

Aksi demonstrasi tersebut terjadi tanggal 22 Juni 1972, dengan beberapa tuntutan, di antaranya mengupayakan pemerataan pembangunan sampai mendesak untuk menurunkan Bupati Bima Letkol Soeharmadji. Adapun mobilisasi massa untuk aksi ini bertempat di Masjid Jami' Suhada dan rumah M. Ali Ta'amin di Desa O'o, Kecamatan Donggo.

Menyimak uraian di atas, maka penting dibahas tentang gerakan sosial-politik dalam bentuk demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat muslim Donggo ini dalam menentang kepemimpinan Letkol Soeharmadji

⁹ Wawancara dengan Abbas Oya, salah satu tokoh penggerak demonstrasi masyarakat Donggo, di rumahnya di Desa Doridungga, Kecamatan Donggo 14 November 2020.

yang dinilai oleh masyarakat muslim Donggo tidak mencerminkan ajaran Islam. Selain itu, untuk melihat secara utuh gerakan sosial-politik masyarakat muslim Donggo ini, peneliti menghubungkan dengan beberapa peristiwa besar yang berkaitan dengan dinamika kehidupan sosial-politik masyarakat muslim di Kecamatan Donggo mulai pada tahun 1969-1972 kiranya dapat memberikan gambaran kronologis terjadinya peristiwa ini.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini berjudul “Gerakan Sosial Umat Islam di Donggo, Bima, Nusa Tenggara Barat Pada Masa Pemerintahan Letkol Soeharmadji, 1969-1973 M.” Adapun fokus pembahasan penelitian ini pada gerakan demonstrasi masyarakat muslim Donggo. Pada kajian ini dibahas tentang situasi umat Islam di Donggo, kebijakan-kebijakan Letkol Soeharmadji, serta aksi protes dan implikasi yang ditimbulkan pasca aksi demonstrasi masyarakat muslim Donggo tersebut. Aksi demonstrasi ini diinisiasi oleh elite-elite desa yang berlatar belakang ulama, haji, birokrat desa, dan mahasiswa yang merasa kecewa atas penggantian Putra Kahir sebagai Bupati DATI II Bima ditambah mandeknya pembangunan di wilayah Kecamatan Donggo oleh beberapa kebijakan Bupati DATI II Bima Letkol Soeharmadji dinilai diskriminatif terhadap masyarakat muslim Donggo.

Pembahasan ini mengambil batasan waktu tahun 1969 hingga tahun 1973. Dimulai tahun 1969 dikarenakan adanya peristiwa besar yang melibatkan umat Islam Donggo dan membuat kelompok gerakan umat Islam mulai terfragmentasi pada elite muslim. Adapun diakhiri pada tahun 1973

karena terjadi operasi penangkapan terhadap pimpinan demonstrasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui Tim Operasi Sadar Donggo (TOSD) yang membuat elite masyarakat muslim Donggo dipenjara dan aksi protes masyarakat muslim kehilangan pemimpin mereka.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana situasi sosial umat Islam di Kecamatan Donggo?
2. Bagaimana perkembangan pembangunan Kecamatan Donggo pada masa Letkol Soeharmadji?
3. Bagaimana gerakan protes umat Islam dan implikasinya terhadap perkembangan sosial-politik di Kecamatan Donggo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain:

1. Dapat menjelaskan gerakan sosial pada era Orde Baru dari masyarakat Donggo yang mayoritas Islam.
2. Menguraikan kajian sejarah sosial lokal yang masih jarang diketahui publik.
3. Sebagai bahan sumbangan penelitian berikutnya yang berkaitan dengan sejarah masyarakat muslim Donggo.

D. Tinjauan Pustaka

Pembahasan tentang “Gerakan Sosial Umat Islam di Donggo, Bima, Nusa Tenggara Barat Pada Masa Pemerintahan Letkol Soeharmadji, 1969-

1973 M.” belum banyak mendapat perhatian. Meskipun demikian, banyak tulisan dan karya-karya sebelumnya yang membahas tentang dinamika peristiwa Donggo ini yang bisa dijadikan referensi dalam penulisan ini:

Buku *Peristiwa Donggo 1972 Sketsa Pergolakan Politik Bima Era Orde Baru*, diterbitkan oleh PT. Suaranusa Niaga Nusantara, Mataram pada tahun 2017, ditulis oleh Mustahid H. Kako dan Ghazaly Ama La Nora. Buku ini merupakan salah satu referensi penting untuk membahas gerakan demonstrasi masyarakat Donggo ini. Secara umum buku ini lengkap membahas peristiwa Donggo dari sebab hingga jalannya aksi demonstrasi tersebut. Buku terdiri dari VI bab, pada bab I, mula-mula menjelaskan geografis wilayah Donggo dan posisinya dalam politik Bima serta menonjolkan sisi kebudayaan yang khas dari *dou* Donggo. Namun, dalam bab ini penjelasan yang dipaparkan masih belum spesifik dan terdapat pernyataan-pernyataan yang mengunggulkan penulis buku ini, Mustahid H. Kako sebagai anggota DPRD Kab. Bima. Pada bab II, menjelaskan peristiwa Donggo 1972, bagaimana jalannya aksi demonstrasi masyarakat Donggo tersebut dijelaskan terlebih dahulu daripada proses mobilisasi massa. Setelah itu dijelaskan kembali jalannya aksi dan hukuman-hukuman yang diterima oleh penggerak aksi tersebut sampai mereka dipenjarakan.

Pada bab III memaparkan tentang penggalangan dukungan dan pembacaan situasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat Donggo yang berdomisili di Jakarta. Jika dibaca dengan teliti, seharusnya pembahasan bab ini merupakan pembahasan pada bab II yang membahas tentang proses

mobilisasi keresahan sosial sebelum aksi demonstrasi tersebut dilakukan. Pada bab ini juga memaparkan kiprah organisasi Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Donggo Bima (IPMDB). Organisasi paguyuban Donggo yang banyak memengaruhi aksi demonstrasi tersebut. Selain itu dijelaskan juga spirit dan ideologi dari organisasi tersebut. Selanjutnya, pada bab IV menjelaskan biografi dari lima orang penggerak aksi demonstrasi ini. Bab V mendeskripsikan serangkaian kesaksian dan memoar para pelaku aksi demonstrasi ini. Bab VI kembali menjelaskan nasib dan hukuman yang diterima oleh lima penggerak aksi demonstrasi ini di balik penjara. Selanjutnya beberapa lampiran foto yang menjelaskan aksi demonstrasi ini. Adapun perbedaan buku tersebut dengan penelitian ini adalah, jika buku tersebut menjelaskan peristiwa demonstrasi ini masih belum kronologis dan belum memberi pembatasan waktu, maka penelitian pada skripsi ini difokuskan pada kronologi waktu serta memberi pembatasan waktu antara tahun 1969 sampai 1973 agar bisa dilihat latar belakang aksi dan kesinambungan serta perubahan yang terjadi pasca aksi tersebut.

Artikel jurnal yang ditulis oleh Subari dan Anwar berjudul “Hegemoni Elit-Elit Lokal Donggo Dalam Membangun Gerakan Sosial Di Bima Tahun 1972” dalam jurnal *Yupa: Historical Studies Journal*, Vol. 5 No. 2, 2021. Artikel ini membahas bagaimana elite-elite lokal menjadi penggerak aksi demonstrasi ini. Penulis juga membahas terkait latar belakang lima orang penggerak demonstrasi tersebut, beserta cara mereka menggalang massa. Selain itu, dalam artikel ini dipaparkan secara singkat terkait jalannya aksi

demonstrasi, serta hukuman yang diterima atas provokasi dan tindakan-tindakannya dalam menggerakkan masyarakat Donggo. Mereka dihukum dengan Undang-Undang Subversif, dan dipenjarakan selama kurang lebih dua tahun. Intinya artikel tersebut memaparkan soal elite lokal, latar belakang, aksi, pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat, dan hukuman diterima kelima tokoh penggerak tersebut. Adapun perbedaan artikel tersebut dengan penelitian yang dilakukan yakni, jika artikel tersebut fokus bahasan utamanya tentang elite-elite lokal hanya di tahun 1972 saja, maka penelitian ini membahas aksi demonstrasi masyarakat Donggo dengan mengaitkan beberapa peristiwa yang terjadi sebelum aksi demonstrasi dilakukan.

Buku Abdullah Tajib yang berjudul *Sejarah Bima Dana Mbojo*, diterbitkan oleh PT. Harapan Masa PGRI, Jakarta pada tahun 1995. Buku ini membahas tentang sejarah Bima sampai pada masa pergerakan nasional di Bima. Buku ini dilengkapi profil sultan-sultan Bima dan kontribusinya dalam membangun Kesultanan Bima. Selain itu, buku ini juga banyak membahas tentang kebudayaan Bima, petuah, dan peribahasa yang ada di tengah-tengah masyarakat. Buku tersebut, juga mengulas tentang *dou* Donggo. Penulis menjelaskan bahwa, masyarakat Donggo pada era Kesultanan Bima, belum ada penyebaran Islam. Masyarakat Donggo saat itu masih mempercayai kepercayaan lokal *makamba makimbi* atau *parafu-marafu*. Kepercayaan tersebut hampir sama dengan animisme dan dinamisme. Buku ini berguna untuk mengetahui konteks kebudayaan masyarakat Donggo sebelum tahun 1970-an, serta masuknya Islam di Bima dan menyebar di seluruh wilayah

Bima dan usaha penyebarannya di Kecamatan Donggo. Usaha penyebaran Islam di Kecamatan Donggo dilakukan atas kebijakan dari Sultan Muhammad Salahuddin dengan mengirim para mubalig dan dai lulusan Madrasah Darul Ulum Bima. Penyebaran Islam di wilayah Donggo dilakukan beberapa gelombang sampai tahun 1960-an. Adapun, perbedaan buku tersebut dengan kajian peneliti yakni terdapat pada konteks pembahasannya, kajian yang dilakukan adalah mengenai masyarakat Donggo sekitar tahun 1969-1973. Sedangkan pembahasan buku tersebut banyak membahas tentang sejarah Bima dan masyarakat Donggo sebelum tahun 1970-an.

E. Landasan Teori

Penelitian tentang sejarah gerakan protes masyarakat muslim Donggo menggunakan pendekatan sosial-politik. Adapun teori yang relevan dengan pembahasan “Gerakan Sosial Umat Islam di Donggo Bima, Nusa Tenggara Barat Pada Masa Pemerintahan Letkol Soeharmadji Tahun 1969-1973 M.” ialah mobilisasi sumber daya. Menurut Mancur Olson bahwa gerakan kolektif sebagai aksi-aksi rasional, memiliki tujuan, dan terorganisasi. Beragam aksi protes tersebut, bersumber dari bagaimana gerakan sosial mengorganisasi ketidakpuasan, mengurangi biaya aksi, menggunakan dan menciptakan jaringan solidaritas untuk mencapai kesepakatan internal.¹⁰

Teori mobilisasi sumber daya dari Mancur Olson tersebut berlaku pada aksi gerakan sosial umat Islam yang dilakukan oleh masyarakat Donggo.

¹⁰ Lihat Mancur Olson, *The Logic of Collective Action Public Goods and The Theory of Groups*, (Cambridge: Harvard University Press, 1965), hlm. 7-8. Lihat juga, Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca Orde Baru*, (Jakarta: LP3ES, 2008), hlm. 130.

Dalam hal ini, masyarakat Donggo melakukan gerakan demonstrasi yang diinisiasi oleh elite masyarakat Donggo yang memiliki pengaruh sosial-politik sebagai bentuk perjuangan untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan umum, pembangunan sosial-politik, dan mencapai perubahan sosial bagi masyarakat Donggo.

Gerakan protes yang dilakukan oleh masyarakat muslim Donggo merupakan salah satu bentuk protes dalam bentuk aksi demonstrasi masyarakat muslim yang merupakan ekspresi mentalitas massa yang diakibatkan oleh kondisi kekecewaan atas kebijakan pembangunan yang tidak melihat latar belakang sosio-keagamaan masyarakat muslim Donggo serta ketimpangan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain itu, ketimpangan pembangunan ini menyebabkan perbedaan sosial antara daerah (masyarakat) maju yang kebanyakan berada di dataran rendah dengan daerah (masyarakat) terbelakang atau pegunungan termasuk wilayah Kecamatan Donggo. Oleh karena itu, paradigma yang dibangun dalam skripsi ini yaitu ekspresi kekecewaan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk demonstrasi pada Bupati Letkol Soeharmadji yang dilakukan oleh masyarakat muslim Kecamatan Donggo tercapai tujuan-tujuan internal masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Adapun konsep-konsep di dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Protes

Protes merupakan sebuah bentuk perlawanan dan ketidaksetujuan satu pihak pada pihak lain. Menurut KBBI, protes merupakan pernyataan tidak menyetujui, menentang, menyangkal.¹¹ Pada konteks ini, aksi protes biasanya berkaitan dengan politik penentangan yang dilakukan secara kolektif untuk menentang elite, otoritas pemerintah, dan tokoh-tokoh penguasa.¹² Selain itu, aksi protes sebagai upaya dan tindakan yang diharapkan memberi dampak luas pada kehidupan sebuah masyarakat agar lebih baik dari sebelumnya.

Aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat muslim Donggo terjadi akibat adanya sikap dan tindakan dari Bupati Bima Letkol Soeharmadji yang dinilai banyak merugikan masyarakat Bima umumnya dan masyarakat Donggo khususnya. Kebijakan-kebijakan politik-pembangunan yang diambil oleh Letkol Soeharmadji dengan mengesampingkan pembangunan di Kecamatan Donggo mengakibatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kecamatan Donggo terabaikan. Oleh sebab itu, terjadi ketimpangan pembangunan antara Kecamatan Donggo dengan wilayah kecamatan lain di Bima.

2. Mobilisasi

Adapun mobilisasi terkait dengan pengerahan golongan masyarakat awam di jalanan dalam upaya mencoba menggunakan kekuatan massa untuk melawan golongan elite, penguasa dan kelompok lawan.¹³ Keberhasilan

¹¹ <https://kbbi.web.id/protes> (diakses pada tanggal 24 Maret 2023 pada pukul 4:00 WIB).

¹² Noorhaidi Hasan, *Islam Politik di Dunia Kontemporer: Konsep, Geneologi, dan Teori*, (Yogyakarta: Sukapress, 2012), hlm. 128.

¹³ Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca Orde Baru*, hlm. 131.

mobilisasi massa terkait erat dengan *framing* yang dilakukan oleh aktor-aktor dalam gerakan sosial. Umumnya, *framing* dilakukan dengan membangkitkan semangat penderitaan masyarakat muslim Donggo dan kekecewaan atas perilaku Letkol Soeharmadji yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam.

Framing yang dilakukan tokoh-tokoh penggerak dalam aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat muslim Donggo ini dengan cara membangkitkan semangat protes sebagai gerakan jihad untuk menegakkan amar makruf nahi mungkar. Semangat tersebut dianggap sebagai jawaban atas penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Letkol Soeharmadji selama menjadi Bupati DATI II Bima. Oleh karena itu, setiap orang wajib membantu dan berjuang bersama untuk tegaknya amar makruf nahi mungkar.

Selain itu, *framing* dan pembacaan situasi dan keadaan masyarakat Donggo dibantu dengan hadirnya IPMDB sebagai basis perkumpulan dan gerakan yang banyak membantu dalam menginisiasi aksi protes secara konseptual yang diterjemahkan dalam aksi oleh para penggerak aksi protes tersebut.

3. Demonstrasi

Secara umum, demonstrasi merupakan upaya pengerahan massa untuk tujuan-tujuan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demonstrasi ialah pernyataan protes yang dikemukakan secara massal.¹⁴ Artinya, demonstrasi sebagai bentuk pernyataan sikap dan protes kepada pihak

¹⁴ <https://kbbi.web.id/demonstrasi> (diakses pada tanggal 9 Januari 2023 pada pukul 2:46 WIB).

tertentu (pemerintah, lembaga, penguasa, elite) yang disertai tuntutan-tuntutan dengan harapan terjadi penyelesaian masalah-masalah tertentu. Aksi demonstrasi menjadi salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum sebagai wujud terjaminnya kebebasan berpendapat.

Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Donggo termasuk dalam upaya menyampaikan pendapat di muka umum agar pemerintah daerah dapat mendengarkan aspirasi dan tuntutan-tuntutan masyarakat Donggo. Demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Donggo dengan melakukan *long march* dari Kecamatan Donggo menuju ke Kecamatan Rasana'E, namun di tengah perjalanan mereka tertahan oleh aparat militer dan perwakilan DPRD DATI II Bima di Desa Pandai sehingga langsung melakukan demonstrasi dan negosiasi di desa tersebut.

4. Perubahan Sosial

Perubahan sosial yakni perubahan pada berbagai dimensi kehidupan masyarakat dan berimplikasi pada sikap, nilai, dan pola dalam masyarakat. Menurut Marvin E. Olsen sebagaimana dikutip Dudung Abdurahman menjelaskan bahwa perubahan sosial terjadi disertai adanya ketegangan sosial, disintegrasi, dan konflik sosial yang biasanya terjadi keterkaitan antara keduanya.¹⁵ Oleh karena itu, perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat bergantung pada sebab dan bagaimana para aktor gerakan sosial menggalang dukungan dan solidaritas sehingga terjadi perubahan sosial.

¹⁵ Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2019), hlm. 11.

Aksi demonstrasi masyarakat Donggo yang kemudian dilanjutkan dengan negosiasi antara masyarakat muslim Donggo dan perwakilan anggota DPRD DATI II Bima telah menghasilkan beberapa kesepakatan yang akhirnya disebut sebagai Kesepakatan Pandai.¹⁶ Adapun dampak lain dari aksi demonstrasi ini ialah perhatian yang lebih luas dari pemerintah pusat terhadap tuntutan-tuntutan masyarakat muslim Donggo yang berimplikasi pada terciptanya perbaikan infrastruktur, pelayanan publik, pembangunan sosial-agama yang harmonis, dan perubahan sosial pada masyarakat Donggo pasca aksi demonstrasi tersebut.

Gerakan sosial-politik masyarakat Donggo tahun 1972 terjadi akibat adanya keresahan sosial masyarakat muslim Donggo yang terorganisasi menjadi ketidakpuasan kolektif kepada Letkol Soeharmadji dengan menggunakan jaringan solidaritas muslim dan jaringan organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Donggo Bima (IPMDB). Selain itu, masyarakat muslim Donggo menganggap diri mereka sebagai masyarakat terbelakang akibat ketimpangan pembangunan sosial-politik dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Letkol Soeharmadji. Sebagai mayoritas masyarakat Donggo yang berprofesi sebagai petani menunjukkan kelas sosial masyarakat Donggo yang rendah. Keadaan tersebut diperparah dengan kondisi infrastruktur pendukung yang kurang memadai seperti jalan rusak dan saluran air yang tidak tersedia.

¹⁶ Kesepakatan Pandai merupakan penyebutan hasil-hasil negosiasi antara masyarakat Donggo dan perwakilan anggota DPRD DATI II Bima, Perwakilan ABRI dari Kodim 1608 Bima yang terletak di Desa Pandai. Lengkapnya lihat, Mustahid dan Ghazaly Ama La Nora, *Peristiwa Donggo 1972 Sketsa Pergolakan Politik Bima Era Orde Baru*, hlm. 95. Lihat juga, Aksa, "Dou Donggo Menggugat Sebuah Gejolak Sosial di Bima Era Orde Baru", *Attoriolog Jurnal Pemikiran Kesejarahan dan Pendidikan Sejarah*, Volume 18, No. 1, 2020, hlm. 141.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, dinamika sosial-politik yang terjadi dalam masyarakat muslim Donggo ini memungkinkan terjadinya perubahan sosial akibat transformasi dan inisiatif rasional aktor-aktor penggerak demonstrasi yang terdiri dari mahasiswa, ulama, dan birokrat desa. Oleh karena itu, teori mobilisasi sumber daya dari Mancur Olson dapat dipakai untuk menjelaskan gerakan sosial-politik masyarakat muslim Donggo.¹⁷

F. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian *library research*. Dengan menggunakan beberapa sumber kepustakaan terutama buku dan artikel jurnal. Peneliti menggunakan metode penelitian sejarah yakni seperangkat asas atau kaidah yang sistematis untuk membantu secara efektif dalam mengumpulkan sumber dan data, kemudian menilainya secara kritis dan menyajikan suatu sintesa hasil yang diurai.¹⁸

Adapun langkah-langkah yang ditempuh:

1. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Tahap heuristik yakni pengumpulan sumber dan data sejarah. Adapun teknik pengumpulan sumber yang peneliti gunakan ialah dengan metode wawancara dan kajian pustaka.

¹⁷ Mancur Olson, *The Logic of Collective Action Public Goods and The Theory of Groups*, hlm. 7-8

¹⁸ Louis Gotschalk, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 32.

- a. Wawancara dengan beberapa narasumber, peneliti mendapatkan informasi terkait aksi demonstrasi masyarakat Donggo. Adapun narasumber yang diwawancarai yakni enam orang.
- 1) Abbas Oya, salah satu pelaku sejarah dan tokoh utama aksi demonstrasi masyarakat Donggo. Informasi yang diperoleh dari Abbas Oya yakni tentang keterlibatan IPMBD, peran aktor-aktor penggerak, dan kronologi jalannya aksi demonstrasi.
 - 2) Ghazaly Ama La Nora yakni anak dari Abdul Majid Bakry dan salah satu penulis buku *Peristiwa Donggo 1972 Sketsa Pergolakan Politik Bima Era Orde Baru*. Adapun informasi yang diperoleh dari Ghazaly Ama La Nora banyak berkaitan dengan peran Abdul Majid Bakry sebagai ulama dan aktivitas dakwahnya serta aktor penggerak yang kharismatik yang menyusupkan nilai-nilai keagamaan dalam semangat perlawanan masyarakat.
 - 3) Alan Malingi, sejarawan Bima dan Kepala Museum Asi Mbojo Bima, melalui wawancara dengan Alan Malingi, peneliti memperoleh informasi dan keadaan pemerintah daerah Bima pada era Orde Baru. Selain itu, kebijakan-kebijakan Letkol Soeharmadji dan peran kepemimpinan Putra Kahir sebagai Bupati DATI II Bima.
 - 4) Paox Iben Mudhaffar, budayawan Nusa Tenggara Barat. Adapun hasil wawancara dengan Paox Iben Mudhaffar, peneliti mendapatkan penjelasan terkait dengan ketimpangan

pembangunan yang dialami oleh masyarakat Donggo. Selain itu, Paox Iben juga menyatakan bahwa masyarakat Donggo secara geografis masyarakat dataran tinggi yang terbiasa dengan kehidupan keras, oleh karena itu, apabila mereka disulut untuk agenda-agenda tertentu menjadi mudah.

- 5) Abdul Wahid, akademisi UIN Mataram dan penulis disertasi *Praktik Budaya Raju dalam Pluralitas Dou Mbawa di Bima, Nusa Tenggara Barat*. Adapun informasi yang diperoleh dari Abdul Wahid lebih banyak berkaitan dengan dampak aksi demonstrasi masyarakat Donggo dalam perubahan orientasi keagamaan dan harmonisasi agama masyarakat Donggo. Adapun jenis wawancara dilakukan dengan wawancara bebas dengan tetap menjaga relevansi dengan kajian pokok perlawanan masyarakat Donggo.
- b. Tahap penelitian pustaka, peneliti mencari dan mengumpulkan sumber pustaka.
 - 1) Perpustakaan Kalikuma, Kota Bima. Peneliti memperoleh beberapa buku yang menjelaskan sejarah dan budaya masyarakat Donggo yang ditulis oleh Abdul Wahid, misalnya buku *Dua Suara Tuhan dan Islam Indonesia Pasca Reformasi*.
 - 2) Perpustakaan Daerah Kabupaten Bima, peneliti menemukan buku yang berjudul *Peristiwa Donggo 1972 Sketsa Pergolakan Politik Bima Era Orde Baru*.

- 3) Perpustakaan Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga dan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, peneliti menemukan beberapa buku dan referensi pendukung terkait teori konflik dan aksi-aksi gerakan demonstrasi pada pemerintah Orde Baru di beberapa tempat di Indonesia.
- 4) Perpustakaan Nasional RI dan Monumen Pers. Peneliti menemukan arsip-arsip berita tentang aksi demonstrasi masyarakat Donggo tahun 1972 yang dimuat dalam beberapa surat kabar, Selain itu, beberapa berita yang dimuat dalam surat kabar *Abadi* tentang budaya masyarakat Donggo.

2. Verifikasi

Setelah data terkumpul, kemudian data-data tersebut peneliti klasifikasikan dan dicari data-data yang memiliki keterkaitan dengan tema yang dibahas. Langkah verifikasi atau kritik sumber juga ini dilakukan dengan melihat keaslian dan kesahihan data-data yang dikumpulkan. Cara mengetahui keaslian sebuah dokumen yakni menguji kondisi fisik, bahasa yang digunakan, gaya tulisannya kemudian kesahihan sumber.¹⁹

Peneliti menggunakan langkah-langkah tersebut dalam mengkritisi sumber-sumber yang diperoleh. Kritik ekstern terhadap sumber buku *Peristiwa Donggo Tahun 1972 Sketsa Pergolakan Politik Bima Era Orde Baru* yakni dengan melakukan identifikasi, bahwa penulis buku tersebut adalah saksi sejarah aksi demonstrasi tersebut. Adapun tahap kolasi dengan

¹⁹ Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, hlm. 108-110.

membandingkan isi buku tersebut dengan sumber lain, peneliti membandingkan dan mengkonfirmasi buku tersebut dengan mewawancarai tokoh utama aksi demonstrasi tersebut. Sedangkan kritik intern adalah dengan cara membandingkan isi buku tersebut dengan isi buku dan tulisan lain serta hasil wawancara dengan tokoh utama peristiwa tersebut yang masih hidup. Adapun contohnya yakni pada buku *Peristiwa Donggo 1972 Sketsa Pergolakan Politik Bima Era Orde Baru* bahwa tidak pernah disebutkan upaya pemenangan Golkar pada Pemilu 1971 melalui komando teritorial (koter) sebagaimana dijelaskan oleh Aksa dalam tulisannya *Peristiwa Donggo 1972 di Bima dalam Melawan Rezim Orde Baru*. Oleh karena itu, menurut peneliti, upaya pemenangan Golkar berlangsung secara terstruktur dan masif oleh rezim Orde Baru, namun tidak secara spesifik menyebut tindakan-tindakan tersebut sebagai sebuah agenda komando teritorial (koter) sebagaimana disebut oleh Aksa.

3. Interpretasi

Tahap berikutnya yakni melakukan interpretasi atau penafsiran dengan cara analisis dan sistesis. Analisis yang peneliti lakukan yakni dengan mencermati konsep-konsep umum dalam gerakan protes dan kemudian diuraikan sehingga membentuk bangunan narasi yang komprehensif. Kemudian sintesis, peneliti menyatukan beberapa peristiwa dan keadaan sosial yang terjadi di Kecamatan Donggo sebelum aksi demonstrasi pada tahun 1972. Interpretasi ini dengan menggunakan analisis sosial-politik, di mana peran-peran aktor penggerak paling banyak memengaruhi gerakan protes ini, ditambah kebijakan pembangunan yang menyebabkan ketimpangan daerah oleh rezim Orde Baru.

Adapun analisis sosial-politik dimaksudkan untuk melihat relasi kelas-kelas sosial masyarakat Donggo dalam membangun solidaritas dalam aksi demonstrasi 1972. Peran elite-elite masyarakat seperti mahasiswa yang diwakili Abbas Oya, ulama oleh Abdul Madjid Bakry dan H. Kako serta birokrat desa diwakil oleh M. Ali Ta'amin dan Jamaluddin. Kelas-kelas sosial yang terbentuk akibat ketimpangan struktur sosial berelasi dengan keadaan politik akibat kebijakan-kebijakan politik pembangunan yang dikeluarkan oleh Letol Soeharmadji.

4. Historiografi

Historiografi merupakan langkah terakhir dalam metode penelitian sejarah. Pada tahap ini aspek kronologi sangat penting. Penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian harus mampu memberikan keterangan dan gambaran dari awal penelitian dimulai, proses penelitian, dan hasil penelitian. Penulisan historiografi ini menggunakan bahasa Indonesia yang baku sesuai PUEBI. Secara keseluruhan penulisan ini akan diuraikan secara kronologis dan sistematis.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini dapat dipahami dan sistematis, maka penulisan ini terbagi menjadi 5 bab. Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, metode penelitian, sistematika

pembahasan. Uraian ini merupakan dasar atau landasan pemikiran untuk bab-bab selanjutnya.

Bab II membahas masyarakat muslim dan kondisi sosial-politik di Kecamatan Donggo yang meliputi kondisi sosial-budaya, situasi umat Islam di Donggo, dan dinamika sosial-politik dan ekonomi yang dilibati oleh masyarakat Donggo. gambaran awal kondisi masyarakat muslim di Kecamatan Donggo yang menjadi alat pengantar dan tali penyambung dalam menguraikan bab III dan IV.

Bab III yakni menguraikan pembangunan masyarakat Donggo pada masa pemerintahan Letkol Soeharmadji. Dimulai dari kepemimpinan Letkol Soeharmadji, kebijakan-kebijakannya pembangunan bagi masyarakat Donggo hingga respons masyarakat muslim Donggo terhadap kebijakan-kebijakan tersebut. Bab ini sangat memengaruhi kebijakan dan membawa dampak bagi masyarakat muslim Donggo yang akan dijelaskan pada bab IV.

Bab IV diuraikan gerakan protes umat Islam terhadap pemerintahan Letkol Soeharmadji. Selain itu, di bab ini akan diuraikan kelompok gerakan dan mobilisasi masyarakat muslim, tokoh-tokoh muslim yang terlibat, jalannya aksi demonstrasi. Lanjutnya, akan diuraikan implikasi gerakan protes masyarakat muslim tersebut bagi masyarakat Donggo.

Bab V memuat kesimpulan, saran baik secara praktis maupun teoritis. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah. Adapun saran berisi masukan dan kritik, baik secara praktis maupun teoritis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan tentang aksi protes masyarakat muslim Donggo serta dampak-dampaknya secara menyeluruh, oleh sebab itu dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Situasi sosial umat Islam di Kecamatan Donggo memiliki corak dan ekspresi keberagaman yang multikultural. Umat Islam di Donggo mengikuti corak keagamaan para mubalig yang berdakwah di Kecamatan Donggo. Adapun mubalig yang berdakwah yakni dari Yayasan Islam Bima (YASIM) yang kemudian bergabung ke organisasi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, hingga Partai Parmusi. Mereka kemudian mendirikan sekolah dan madrasah.
2. Kebijakan Letkol Soeharmadji ialah membangun infrastruktur, memajukan pertanian dengan mengacu pada Repelita I. Kebijakan-kebijakan tersebut, dijanjikan langsung oleh Letkol Soeharmadji kepada masyarakat muslim Donggo. Namun, kebijakan pembangunan tersebut tidak kunjung terealisasi dalam bentuk nyata bagi masyarakat Donggo. Kebijakan pembangunan yang dijanjikan oleh Letkol Soeharmadji hanya tersentralisasi pada wilayah Kecamatan Rasana'E. Selain itu, salah satu kebijakan kontroversial yang dikeluarkan oleh Letkol Soeharmadji yakni ingin mengubah lapangan Merdeka (alun-alun Bima) menjadi stasiun bus. Masyarakat muslim Donggo khawatir

dengan Letkol Soeharmadji bahwa wacana pergantian nama tersebut benar-benar direalisasikan di bawah kepemimpinan Letkol Soeharmadji. Kekhawatiran tersebut dinilai ingin menghilangkan nilai historis masyarakat muslim Donggo.

3. Gerakan protes umat Islam di Donggo melibatkan kelompok gerakan yakni adanya kelompok gerakan yang diinisiasi oleh IPMDB. IPMDB ialah sebuah organisasi paguyuban bagi masyarakat Donggo yang berada di Jakarta. IPMDB bersifat paguyuban, dibentuk sebagai wahana komunikasi antara masyarakat Donggo dan pelajar-mahasiswa di tanah rantau. Adapun ideologi yang dipakai IPMDB yakni ideologi Islam dengan tujuan demi tegaknya *izzul Islam wal Muslimin* dan kejayaan NKRI. Semangat IPMDB yakni menyebarkan amar makruf nahi mungkar atas kondisi negara yang dianggap saat itu sudah jauh melenceng dari ajaran Islam. Adapun implikasi-implikasi dari aksi protes masyarakat muslim Donggo ini ialah para tokoh-tokoh masyarakat muslim ditangkap dan dipenjarakan oleh pihak militer melalui serangkaian aksi operasi. Selain itu, implikasi dari aksi protes masyarakat muslim ini ialah terjadinya gelombang konversi agama dari masyarakat Donggo yang non muslim memilih menjadi muallaf sebagai bagian orang Islam. Dalam bidang infrastruktur, pemerintah mulai melakukan pembangunan infrastruktur perkantoran dan pemberian bantuan-bantuan bibit kepada masyarakat Donggo.

B. Saran-Saran

1. Penelitian ini terbatas pada gerakan sosial umat Islam terhadap negara dalam bidang politik di Kecamatan Donggo. Oleh karena itu, besar harapan peneliti agar peneliti lain dapat mengkaji gerakan sosial umat Islam di Kecamatan Donggo hubungannya dengan persoalan kebijakan agraria oleh pemerintah
2. Kajian ini menggunakan teori mobilisasi sumber daya dengan pendekatan sosial-politik. Peneliti berharap peneliti lain dapat mengkaji gerakan sosial umat Islam Donggo dengan teori gerakan sosial agar lebih terlihat faktor dan peran aktor umat Islam dalam memobilisasi gerakan sosial.
3. Setiap gerakan sosial, aksi protes, tuntutan aksi sebaiknya disuarakan terus menerus dan kontinu, agar gerakan sosial yang diusahakan berhasil.
4. Pembangunan sebenarnya bisa dilakukan tanpa adanya aksi demonstrasi, namun harus bisa mengamodasi kepentingan pemerintah dan kecenderungan politik, sehingga kerja sama antara masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan bisa terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurahman, Dudung. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak, 2019.
- Ali, Jakub, dkk. *Aspek Geografi Budaya dalam Wilayah Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983.
- ANU, Tim PIES [Ed.]. *Islam Indonesia Pasca Reformasi Dinamika Keagamaan Pada Ranah Sosial, Politik, Budaya, Hukum dan Pendidikan*. Surabaya: Imtiyaz, 2015.
- Asmarini, Ni Putu, I Made Sudiarga, dkk., *Sastra Lisan Donggo*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998.
- Gotschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press, 1992.
- Hasan, Noorhaidi. *Laskar Jihad Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: LP3ES, 2008.
- , *Islam Politik di Dunia Kontemporer: Konsep, Geneologi, dan Teori*, Yogyakarta: Sukapress, 2012.
- Ismail, M. Hilir. *Sejarah Mbojo Bima dari Zaman Naka ke Zaman Kesultanan*. Bogor: Rizald, 2007.
- Jurdi, Syarifuddin. *Historiografi Muhammadiyah Bima Akar Sejarah, Aktor Gerakan, dan Praxis Sosial*. Yogyakarta: CNBS, 2009.
- Kako, Mustahid H, dan Ghazaly Ama La Nora. *Peristiwa Donggo 1972 Sketsa Pergolakan Politik Bima Era Orde Baru*. Mataram: PT. Suaranusa Niaga Nusantara, 2017.
- Kartadarmadja, M Soenjata dan Sutrisno Kutoyo [Ed.]. *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: Departemen dan Kebudayaan Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1977/1978.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara wacana, 2013.
- Mas'ood, Mohtar. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Mutawalli, Muhammad. *Peradilan Dou Donggo Kontestasi Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Nasional*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2021.
- Olson, Mancur. *The Logic of Collective Action Public Goods and The Theory of Groups*. Cambridge: Harvard University Press, 1965.

- Rahman, M Fachrir. *Islam di Bima: Kajian Historis tentang Proses Islamisasi dan Perkembangannya sampai Masa Kesultanan*. Yogyakarta: Genta Press, 2008.
- Sunihati, Anak Agung Dewi, dkk. *Struktur Bahasa Donggo*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983.
- Syamsuddin, M Din. *Islam dan Politik Era Orde Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Wahid, Aba Du. *Jara Mbojo Kuda-Kuda Kultural*. Mataram: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB, 2011.
- Wahid, Abdul. *Dua Suara Tuhan Pergumulan Etos Agama dan Budaya di Ruang Publik*. Mataram: Alamtara Institute bekerjasama dengan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram, 2020.

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Effendy, Muslimin AR. “Dou, Ruma, Labo Dana: Dinamika Politik di Kesultanan Bima 1905-1957.” Disertasi Universitas Indonesia, 2011.
- Inayati, Nurul. “Islamisasi di Donggo (Suatu Tinjauan Historis)” Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2016.
<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/925/1/Nurul%20inayati.pdf>
- Juhdy, Khairul. “Ulama Versus Politheis (Analisis Terhadap Eksistensi Ulama dalam Upaya Mengubah Kepercayaan pada Keckeramatan Parafu di Kalangan Masyarakat Bima)” Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1996. <http://digilib.uinsa.ac.id/11603>
- Saifullah. “Dampak Peristiwa Donggo 1972 Terhadap Kehidupan Sosial, Ekonomi, Politik di Kabupaten Bima” Skripsi STKIP Taman Siswa Bima, 2011.
- Wahid, Abdul. “Praktik Budaya Raju dalam Pluralitas Dou Mbawa di Bima Nusa Tenggara Barat.” Disertasi Universitas Udayana Bali, 2016.

Artikel Konferensi

- Dody Molasy, Honest. “The Implementation of Islamic Law in Indonesia What Should We Learn from Suku Donggo” *Coference Proceedings 12 AICIS*, Surabaya, 2012.

Situs Web

- Fitria, Doni. “Repelita 1 April 1969”. Diakses 3 Juli 2022. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id>
- John. “Perkembangan Umat Katolik di Donggo”. Diakses 9 Mei 2023. <http://johnlimbawadonggobima.blogspot.co/2011/12/munculnya-agama-kristen-di-donggo>
- Rizki, Fahru. “Mengenal Agama Asli Suku Mbojo”. Diakses 22 Juni 2023. <http://www.mbojoklopedia.com/2015/11/mengenal-agama-suku-asli-mbojo>
- Tolomundu, Muchlis Dj. “Pembangangan Putri, Sop Ikan, dan Wane”. Diakses 23 Juni 2023. <https://harianamanat.com/2021/09/26/pembangangan-putri-sop-ikan-dan-wane>
- Wahid, Abdul. “Konflik Ulama Tua-Ulama Muda: Menegosiasikan Pola Penyiaran-Pengembangan Islam di Bima, Nusa Tenggara Barat”. Diakses 12 April 2023. <https://repository.uinmataram.ac.id>.
- Wahid, Abdul dan Atun Wardatun, “Penguatan Konservatisme dan Dinamikanya dalam Perubahan Sosial Politik: Kasus Nusa Tenggara Barat”. Diakses 20 Juni 2022 <https://repository.uinmataram.ac.id>,
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_Bupati_Bima Diakses 21 Juni 2022.
<https://www.mediadinamikaglobal.id/2021/02/sejarah-singkat-dibangunnya-pondok/html>, Diakses 9 Mei 2023.
<https://kbbi.web.id/protes>. Diakses 24 Maret 2023.
<https://kbbi.web.id/demonstrasi>, Diakses 9 Januari 2023.

Jurnal

- Aksa. “Peristiwa Donggo 1972 di Bima dalam Melawan Rezim Orde Baru”. *Jurnal Al Qalam*, Volume. 25, No. 3 November 2019.
- . “Dou Donggo Menggugat: Sebuah Gejolak Sosial di Bima Era Orde Baru”. *Jurnal Attoriolog*, Volume 18, No. 1, 2020.
- Purna, I Made. “Kearifan Lokal Masyarakat Desa Mbawa dalam Mewujudkan Toleransi Beragama”. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Volume. 1, No. 2 Agustus 2016.

Subari dan Anwar. "Hegemoni Elit-elit Lokal Donggo dalam Membangun Gerakan Sosial di Bima Tahun 1972". *Jurnal Yupa: Historical Studies Journal*, Volume. 5, No. 2, 2021.

Wawancara

Wawancara dengan H. Abbas Oya, salah satu tokoh penggerak demonstrasi masyarakat Donggo, di rumahnya di Desa Doridungga, Kecamatan Donggo 14 November 2020.

Wawancara dengan Alan Malingi, sejarawan Bima, tanggal 14 Desember 2021.

Wawancara dengan Ghazali Ama La Nora, anak H. Majid Bakry via *WhatsApp* 1 Agustus 2022.

Wawancara dengan Paox Iben Mudhaffar, budayawan Nusa Tenggara Barat, tanggal 9 November 2022.

Wawancara dengan Abdul Wahid, akademisi UIN Mataram, tanggal 10 Mei 2021.